

# Fahri Hamzah Minta Jokowi Turun Tangan soal Reklamasi

Abi Sarwanto , CNN Indonesia | Rabu, 11/10/2017 13:58 WIB



Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo dapat turun tangan mengurus kelanjutan nasib reklamasi Teluk Jakarta pasca moratorium dicabut.. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan kelanjutan proyek reklamasi **Teluk Jakarta**. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi dicabutnya moratorium 17 pulau reklamasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Fahri berharap Jokowi berdialog dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait reklamasi, sebab Anies-Sandi dalam kampanyenya pernah berjanji akan menghentikan program reklamasi.

"Presiden *dong* turun tangan, bicara dengan Pak Anies dan Sandi bagaimana masa depannya ini. Ini studinya kayak begini, keadaan kayak begini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10).

Lihat juga:

[Eggi Sudjana Ancam Anies-Sandi terkait Proyek Reklamasi](#)

Fahri menyarankan pemerintah pusat bersabar menunggu Anies-Sandi resmi menjabat. Setelah Anies-Sandi resmi menjabat, barulah Jokowi membicarakan kelanjutan reklamasi dengan Anies-Sandi.

Fahri menilai pemerintah tengah menghadapi persoalan investasi di reklamas. Namun Fahri mengingatkan presiden juga menjaga perasaan masyarakat.

Selain itu, janji Anies-Sandi menghentikan reklamasi menurutnya harus menjadi bahan

pertimbangan lain bagi Jokowi.

"Dia (Anies-Sandi) punya janji kampanye. Janji kampanye itu kalau tidak dilaksanakan masuk pada pasal kebohongan publik. Karena salah satu pasal kebohongan publik adalah orang tidak melaksanakan janji kampanye," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri meminta presiden tidak mengecilkan persoalan proyek reklamasi. Persoalan itu dianggap sudah berkaitan dengan isu hukum yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut moratorium pembangunan atau reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta, pada 6 Oktober 2017.

Melalui surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 yang ditandatangani oleh Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah memberitahukan kepada Pemprov DKI moratorium itu telah dicabut sehingga proyek reklamasi kembali bisa dilanjutkan.

Lihat juga:

[Anies Baswedan Janji Blakblakan Soal Reklamasi Usai Dilantik](#)

(ugo)